

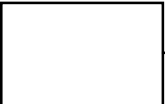
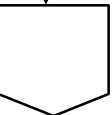
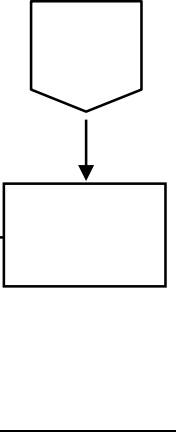




SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/0027/PLIP.Kominfosanti/I/2025
	TGL. PEMBUATAN	:	6 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	6 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	:	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng</p>  <p style="text-align: center;"><u>KETUT SUWARMAWAN, SStP.MM</u> NIP. 198107112001121002</p>
NAMA SOP	:	FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi public 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi 		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer dan Printer 6. Putusan Penyelesaian Sengketa 7. Surat Kuasa 		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID/ PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan keberatan Informasi Publik oleh Atasan PPID dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali					1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Berkas/ dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	
2.	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID/PPID Pelaksana untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali					Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat Undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3.	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkan kepada Atasan PPID					1. Surat Undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/ materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	

4.	Menugaskan PPID/PPID Pelaksana untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/ materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5.	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali					1. Nota Dinas 2. Berkas/ materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6.	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dan dihadiri oleh PPID/PPID Pelaksana bersama tim yang ada di dalam Surat Kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	